

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank* TA 7010. 2008. *Strategy and Roadmap for Devolving the Property Tax in Indonesia*. Jakarta.
- Asian Development Bank* (ADB) dan Kementerian Keuangan. 2010. Strategi dan Peta Riwayat Pelimpahan Wewenang Pajak Bumi dan Bangunan, Seri Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Makalah No. 1). Jakarta.
- Bahl, Roy dan Vasques, Jorge Martinez. 2007. *The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects*. Lincoln institute of land policy.
- Bahl, Roy etc. 2008. *The Property Tax in Practice, Chapter 1 of the March 2008 Publication, Making the Property Tax Work: Experience in Developing and Transitional Countries*. Lincoln institute of land policy.
- Bird, Richard M. 2003. *Local and Regional Revenues: Realities and Prospects International Tax Program, Rotman School of Management, University of Toronto*.
- Brojonegoro, B.Permadi. 1992. AHP. Pusat Antar Univesitas, Studi Ekonomi, UI. Jakarta.
- Budhi, Made Mahendra. 2001. Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, Suatu Evaluasi terhadap Realisasi Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang. Tesis FISIP-UI. Depok.
- Dadi, Iwan Hindawan. 2000. Seri Kajian Pajak Properti "Pajak Properti". Lembaga Kajian Properti Indonesia. Jakarta.
- Davey, Kenneth. Penterjemah Amanullah dkk. 1998. *Financing Regional Government*, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Devas, Nick dkk. 1999. *Financing Local Government in Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Ehtisham, Ahmad dkk. 2002. *Intergovernmental Grant System: Application of a General Framework to Indonesia*. IMF Working Paper No. WP/02/128, *International Monetary Fund*. Washington DC.

Gunadi dkk. 1999. *Perpajakan*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Global properti guide di <http://www.globalpropertiguide.com>

Hirawan, Susiyati Bambang. 2007. *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Isdijoso dan Wibowo. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1. Maret 2002.

Kelly, Roy. 1999. *Designing a Property Tax Reform Strategy for Sub-Saharan Africa: An Analytical Framework Applied to Kenya*, *Development Discussion Paper No. 707*.

Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.

Litvack, Jenie. 1999. *Decentralization*. *World Bank*. Washington DC.

Mahi, Raksaka. 2002. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Media Indonesia edisi Kamis, 03 Januari 2002. Jakarta.

Mahi, B. Raksaka dan Adriansyah. 2003. *Sejarah Transfer Keuangan Pusat ke Daerah dalam Machfud Sidik dkk, Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Buku Kompas. Jakarta.

Mahi, Raksaka. 2005. *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 Juli 2005. Jakarta.

- Musgrave, Richard A. dkk. 1993, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Penerjemah Alfonsus Sirait. Erlangga. Jakarta.
- Nasucha, Chaizi. 1995. *Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah*. Kisaint Blanc. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 1994. *Dasar-dasar Perpajakan*. IND-HILL-Co. Jakarta.
- Uppal dan Suparmoko. 1986. *Inter Government Finance in Indonesia: Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol.XXXIV. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1994. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (www.indonesia.go.id).
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (www.indonesia.go.id).
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (www.indonesia.go.id).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (www.indonesia.go.id).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (www.indonesia.go.id).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (www.indonesia.go.id).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (www.indonesia.go.id).
- Saaty, T.L. 1994. *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process*, RWS Publications, Pittsburgh PA.

- Shah, Anwar. 1994. *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies*. Penelitian Kebijakan - Bank Dunia.
- Sidik, Machfud. 2000. Model Penilaian Properti Berbagai Penggunaan Tanah di Indonesia. Yayasan Bina Umat Sejahtera. Jakarta.
- Sjahfrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma. Jakarta.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Jakarta. Jakarta.
- Suparmoko, M. 1997. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. BPFE. Yogyakarta.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta.
- Syafroni, R. Abeth. 2002. Pajak bumi dan Bangunan dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Wilayah Propinsi DKI Jakarta (Suatu Tinjauan untuk meningkatkan Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan). Tesis FISIP-UI. Depok.
- _____, Sejarah PBB, (www.pajakbumidanbangunan.com)